

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menyusun rencana

pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja PD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

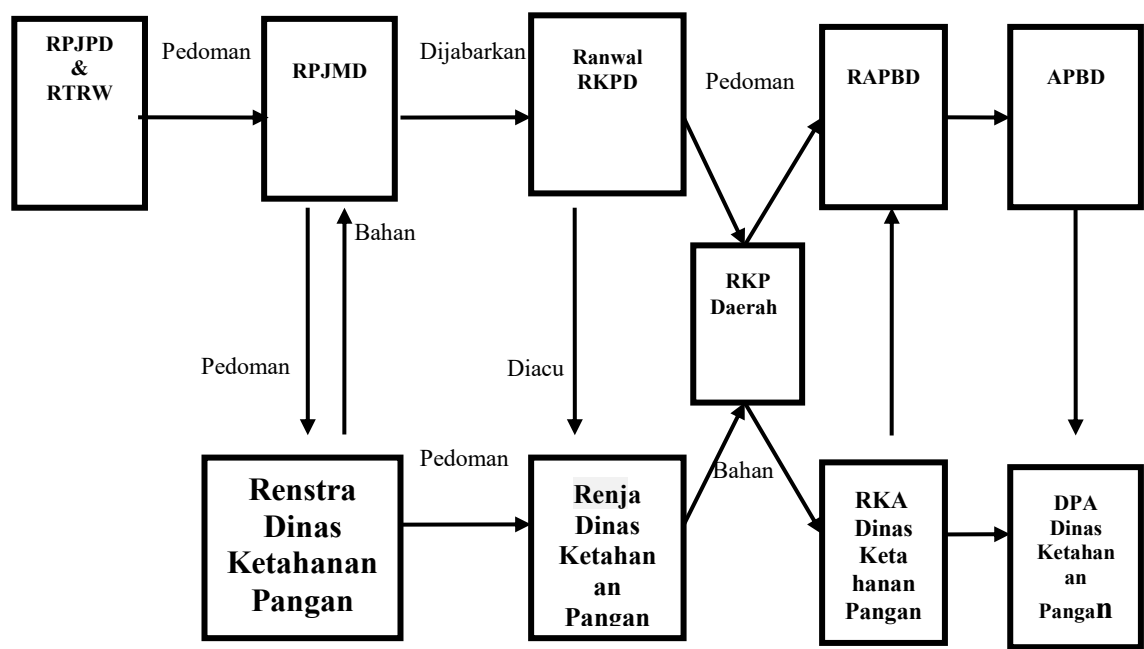
RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018, Dinas Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja PD juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan

prakiraan maju. Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam mendukung Misi ke 5 Bupati Malang yaitu “Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan produk unggulan desa”. Keterkaitan Renja K/L dan Renja Provinsi dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang digunakan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas

pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang terhadap sasaran Renja K/L dan Renja Provinsi sesuai dengan urusan ketahanan pangan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;p
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/307/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, sedangkan tujuannya adalah:

1. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang;

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 8 program dan 31 kegiatan. Evaluasi pencapaian sasaran menunjukkan capaian kinerja sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, baik penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuannya SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
	Urusan: Perencanaan									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran (%)	100%	-						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar (buah)	15000 buah	12 bulan	3000 buah	3000 buah	100%	3000 buah	6000 buah	40%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1464 OB	12 bulan	264 OB	250 OB	94,7%	300 OB	550 OB	37,6%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	120 OB	12 bulan	24OB	24 OB	100%	24 OB	48 OB	40%
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	144 unit	12 bulan	64 Unit	64 Unit	100%	20 unit	84 Unit	58,3%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	196 jenis	12 bulan	44 jenis	44 jenis	100%	38 jenis	82 jenis	41,8%
7	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Jumlah barang cetakan ynnng disediakaan (jenis)	33 jenis	12 bulan	9 jenis	9 jenis	100%	6 jenis	15 jenis	45,45%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	32 jenis	12 bulan	12 jenis	12 jenis	100%	5 jenis	17 jenis	53,1%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	12 bulan	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	180 HOK	-	-	-	-	45 HOK	45 HOK	25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	124 HOK	12 bulan	24 HOK	24 HOK	100%	25 HOK	49 HOK	39,5%
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	892 HOK	12 bulan	212 HOK	212 HOK	100%	170 HOK	382 HOK	42,8
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)	100%							
1	Pembangunan gedung kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)	9 unit	9 unit	-	-		-	9 unit	100%
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	4 jenis (12 unit)	12 bulan	-	-		2 jenis (3 unit)	2 jenis (3 unit)	50%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	5 jenis (4 unit)	-	1 jenis (1 unit)	1 jenis (1 unit)	100%	1 jenis (2 unit)	2 jenis (3 unit)	40%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	2 unit	2 mobil/1 tahun	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	-						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/survei kepuasan masyarakat) (buku)	770 buku (14 jenis)	12 bulan	70 Buku (14 jenis)	70 Buku (14 jenis)	100%	175 buku (14 jenis)	245 (14 Jenis)	31,8%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	500 buku (10 jenis)	-	100 buku (10 jenis)	100 Buku (10 jenis)	100%	100 buku (10 jenis)	200 buku (10 jenis)	40%
IV	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan Laporan Program dan kegiatan peningkatan Ketahanan Pangan								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
1	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan	120 Buku	-	-	-	-	30 buku	30 buku	25%
V	Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan	10,05%	-	-	-	-	10,80%	10,80%	
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan atau rentan pangan	8 buah	-	-	-	-	11 buah	11 buah	25%
2	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	4 desa	-	-	-	-	1 Desa	1 desa	25%
3	Analisa Ketersediaan Pangan	Jumlah analisis Ketersediaan Pangan	120 buku	-	-	-	-	30 buku	30 buku	25%
VI	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	0.034%	-	-	-	-	0.034%	0.034%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
1	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah laporan (Database) harga pangan di 33 pasar Tradisional pada 33 kecamatan	96 buku	-	-	-	-	24 buku	24 buku	25%
2	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Jumah cadangan pangan masyarakat	32 ton	-	-	-	-	8 ton	8 ton	25%
3	Penanganan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	12 unit	-	-	-	-	3 unit	3 unit	25%
VII	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	88.8%	-	-	-	-	88.4%	88.4%	
1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	8 buah	-	-	-	-	2 buah	2 buah	25%
2	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	104 kelompok	-	-	-	-	26 kelompok	26 kelompok	25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
3	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah sarana promosi penganekaragaman pangan	64 kali	-	-	-	-	16 kali	16 kali	25%
4	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan kecamatan	80 kali	-	-	-	-	20 kali	20 kali	25%
VII	Program Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	68%	-	-	-	-	62%	62%	
1	Kelembagaan Keamanan Pangan	Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang dibentuk	33 kelompok	-	-	-	-	10 kelompok	10 kelompok	30,30%
2	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	80 buku	-	-	-	-	20 buku	20 buku	25%
3	Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	48 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
IV	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Tingkat Rumah Tangga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah peta ketahanan dan kerawanan pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	1 buah	1 buah	1 Buah	1 Buah	100%	-	1 buah	100%
2	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah laporan PPH Kabupaten Malang	1 Buah	-	1 Buah	1 Buah	100%	-	1 buah	100%
3	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Jumlah laporan dewan ketahanan pangan	30 Buku	1 dokumen	30 buku	30 buku	100%	-	30 buku	100%
4	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	30 Kelompok	2 Kecamatan	30 Kelompok	30 Kelompok	100%	-	30 kelompok	100%
5	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan (gabah) yang didistribusikan	10 Ton	33 Kecamatan	10 ton	10 ton	100%	-	10 ton	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
6	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa untuk persiapan dan penumbuhan replikasi desa mandiri pangan	4 Desa	2 desa	4 desa	4 desa	100%	-	4 desa	100%
7	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah lumbung pangan desa yang dibina dan dikembangkan	2 Desa	37 Poktan	2 desa	2 desa	100%	-	2 desa	100%
8	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah uji mutu keamanan pangan	33 Kali	33 kecamatan	33 kali	33 kali	100%	-	33 kali	100%
9	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah sarana promosi pangan	5 Kali	1 paket	5 kali	5 kali	100%	-	5 kali	100%
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan program dan kegiatan	20 Buku	33 kecamatan	20 buku	20 buku	100%	-	20 buku	100%
11	Penanganan Konsumsi Pangan	Jumlah peta pola konsumsi pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	1 Buah	-	1 buah	1 buah	100%	-	1 buah	100%
12	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah sarana promosi, penganekaragaman pangan	14 Kali	-	14 kali	14 kali	100%	-	14 kali	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
13	Pengembangan pangan lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan Kecamatan	33 Kali		33 kali	33 kali	100%	-	33 kali	100%
14	Kelembagaan keamanan pangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi satgas kewan pangan	7 Kali		7 kali	7 kali	100%	-	7 kali	100%
15	Pengawasan keamanan pangan	Jumlah uji keamanan pangan segar	33 Kali	-	33 kali	33 kali	100%	-	33 kali	100%
16	Kerjasama dan informasi keamanan pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	33 Kali	-	33 kali	33 kali	100%	-	33 kali	100%
17	Pengembangan distribusi pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	2 Unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	2 unit	100%
18	Pemantauan harga dan pasokan pangan	Jumlah bahan akses pangan (beras) yang didistribusikan	2 Paket	-	2 paket	2 paket	100%	-	2 paket	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
V	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Kelancaran Penyuluhan dan Pendampingan Petani pelaku agribisnis	100%	80%	-	-	-	-	-	-
1	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok dan gapoktan	33 kecamatan	33 kecamatan	-	-	-	-	33 kecamatan	100%
2	Penguatan Kelembagaan Kel. Petani Tembakau (DHBCT)	Jumlah kelembagaan kelpok tani	10 kelompok	10 Kelompok	-	-	-	-	10 Kelompok	100%
VI	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan pemenuhan profesionalitas penyuluh pertanian/perkebunan	100%	80%					80%	100%
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah demplot yang tertangani	33 kecamatan	10 Kelompok	-	-	-	-	10 Kelompok	100%
2	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Jumlah peningkatan produk pertanian	33 kecamatan	10 Kelompok	-	-	-	-	10 Kelompok	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=7+9	11=10/4x100%
3	Penyuluh dan Pendampingan Bagi Pertanian / Perkebunan	Jumlah pendampingan petani	33 kecamatan	10 Kelompok	-	-	-	-	10 Kelompok	100%

Dari tabel diatas (Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan), diketahui bahwa pada Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (kolom 10 & 11) pada dasarnya program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen E-Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2018, hanya saja Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (kolom 10 & 11) kurang terukur maksimal karena ada beberapa capaian kinerjanya tidak dapat diakumulasi/dihitung keseluruhan dalam periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, hal ini disebabkan karena pada Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (kolom 5) yang merupakan tahun awal periode Renstra Perangkat Daerah terdapat beberapa perbedaan/penyesuaian baik nomenklatur program/kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir. Bahwasannya pada Tahun 2016 secara keseluruhan rata-rata program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 24 Oktober 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Nomor 188.4/33.2/KEP/35.07.207/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Seperti kita ketahui bahwa seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembanguna sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan

pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan target program tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga kedudukan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu lima tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten

Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* (pemangku kepentingan) pembangunan lainnya.

Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup :

1. Penyesuaian tugas dan fungsi perangkat Daerah
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang merupakan PD teknis dalam bidang ketahanan pangan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Malang termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Dari Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pada Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang mengambil Penganekaragaman dan Keamanan Pangan. Sedangkan pada Tahun 2019 pelayanan dasar yang diambil adalah Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dengan indikator meningkatnya kualitas pangan masyarakat.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan												
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan (food availability) Persentase lumbung pangan desa	Pelayanan dasar Keter sediaan & Cadang an pa ngan	Persentase lumbung pangan desa	86.67 %	-	-	-	88.89%	-	-	-	Jumlah lumbung pangan yang aktif dibagi Jumlah lumbung pangan yang ada dikali 100 %
2.	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Pelayanan dasar Distribusi & Akses Pangan	Persentase Coifisien Variasi (CV) harga pangan di tingkat konsumen	CV < 25%	-	-	-	CV < 10%	-	-	-	Stabilisasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen diukur dengan nilai Coefisien Variasi (CV) pada nilai CV < 10 %. CV adalah parameter untuk mengukur fluktuasi harga dalam kurun waktu tertentu.
3.	Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Pelayanan dasar Penganeka- ragaman dan Keamanan Pangan	Persentase Nilai/ Skor Pola Pangan Harapan	95.65%	-	-	-	97,44%	-	-	-	Skor PPH konsumsi dibagi skor PPH yang ditargetkan dikali 100 %

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Meningkatkan ketersediaan pangan segar yang aman untuk dikonsumsi	Pelayanan dasar Panganeka-ragaman dan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	60%	-	-	-	60%	-	-	-	Jumlah sampel pangan segar yang aman dibagi Jumlah sampel pangan segar yang diambil dikali 100 %
5.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	-	Skor PPH Ketersediaa n	-	81,6	82,1	82,6	-	81,6	82,1	82,6	Pada tahun 2018 untuk menjadi 2 indikator dengan didukung 4 program

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	-	Skor PPH Konsumsi	-	88.2	88.3	88.4	-	88.2	88.3	88.4	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang memiliki tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi daerah bidang pangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:
 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendapat dukungan dana pendampingan sebagai perwujudan ketahanan pangan;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten:
 - Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Terdapat Desa Rentan / Rawan Pangan;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa, puting beliung);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah yang memadai (0,034 % per tahun);

- Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
 - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MANDEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada Misi ke 5 “Melakukan percepatan pembangunan Desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa”. Sasarannya “ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang yang memiliki fungsi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi daerah bidang pangan, maka dalam kegiatannya harus menggabungkan beberapa sektor pembangunan yaitu ketahanan pangan, pertanian,

peternakan, perikanan, dan kehutanan sehingga perlu berkoordinasi dengan SKPD terkait sektor-sektor tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu koordinasi dengan SKPD lain terkait penanganan bersama hal-hal dalam bidang ketahanan pangan. Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh eksponen pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang yaitu :

- Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan impor yang beredar di pasaran
- Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan
- Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)
- Sulitnya mengakses data pangan secara cepat dan akurat
- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektoral
- Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum berperan optimal
- Lembaga penyangga harga pasar hasil pertanian belum berperan optimal
- Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat
- Masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat
- Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras

- Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian
- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak dapat dilaksanakan di daerah karena tidak disertai dengan adanya Peraturan Perundangan
- Adanya kebijakan Pasar Global

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga
- Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Malang
- Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar; Dinas Kesehatan; dan Badan POM serta Bulog
- Adanya intervensi pemerintah dalam upaya pengendalian harga gabah yang dilaksanakan oleh Bulog, TNI, Kementrian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Lembaga Pembelian Gabah (serapan Gabah Tani dari Luar Kualitas).
- Terbentuknya kelompok Afinitas Mandiri pada setiap program dan kegiatan yang bersifat kepenyuluhan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin
- Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Povinsi, Kabupaten dan Kota
- Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu
- Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan
- Adanya Kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal penerapan prinsip partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan

pembangunan

Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (strength – opportunity) antara lain dengan :
 - a. Mengintegrasikan program ketahanan pangan, terutama dalam hal konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - b. Meningkatkan fasilitasi dalam pembinaan kepada petani & produsen pangan olahan untuk menyediakan pangan yang bermutu (on farm & off farm);
 - c. Mendorong dan meningkatkan peran dalam membantu peningkatan program ketahanan pangan;
 - d. Meningkatkan peran kelembagaan pangan dalam membangun ketahanan pangan;
 - e. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal;
 - f. Mengembangkan metode partisipatif;
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (strength – threats); antara lain dengan :
 - a. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bertumpu pada sumberdaya lokal dan kelembagaan yang ada;
 - b. Meningkatkan fasilitasi dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi asas B2SA yang halal, terutama yang berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatkan daya saing produk olahan pangan;
 - d. Menjaga stabilisasi harga pangan;
 - e. Restrukturisasi kelembagaan pangan.
3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (weakness – opportunity) antara lain dengan :
 - a. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan;
 - b. Meningkatkan SDM kelembagaan pangan dan aparatur guna mewujudkan ketahanan pangan melalui penyelenggaraan edukasi;

- c. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan dalam bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - d. Membangun kesiapan aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah akses kerawanan dan keamanan pangan;
 - e. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat;
 - f. Meningkatkan fungsi kelembagaan pangan menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan tangguh;
 - g. Memfasilitasi permodalan kelembagaan pangan;
 - h. Membangun jejaring informasi dan teknologi agribisnis.
4. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (weakness- threats) antara lain dengan :
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif;
 - b. Mengupayakan pemupukan modal kelembagaan pangan melalui pola usaha yang efektif dan efisien;
 - c. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan dan masyarakat mencintai produk makanan dalam negeri;
 - d. Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan diversifikasi pangan secara terus-menerus melalui berbagai media;
 - e. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman;
 - f. Membangun cadangan pangan masyarakat;
 - g. Meningkatkan peran kelembagaan pangan dalam keseluruhan sistem ketahanan pangan melalui kegiatan produktif.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei 2016. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang juga mengalami perubahan sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, diantaranya:

- penambahan jabatan eselon IV di setiap Bidang;
- penambahan urusan pangan yang lebih detail;
- perubahan nomenklatur Bidang dan Sub Bidang.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) serta kegiatan-kegiatan yang mendukungnya.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pada awal tahun, di samping menyesuaikan RKA dan DPA yang sudah disusun, juga menyesuaikan situasi keadaan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan program dan kegiatan yang sudah disusun, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan, perlu dilakukan

review rancangan rencana program dan kegiatan yang mengakibatkan review RKPD. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Oeperasional Perkantoran (%)	100%	691.489.500	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	DKP	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	610.955.000	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	Jumlah registrasu surat masuk dan surat keluar (buah)	3000 buah	10.560.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	Jumlah registrasu surat masuk dan surat keluar (buah)	3000 buah	9.600.000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	DKP	Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	24.288.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	DKP	Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	20.280.000	
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DKP	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	312 OB	335.346.000		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DKP	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	300 OB	383.400.000	
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DKP	Jumlah petugas kebersihan	12 bulan	19.849.500		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DKP	Jumlah petugas kebersihan	24 OB	4.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DKP	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	60 unit	11.000.000		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DKP	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	20 unit	3.750.000	
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DKP	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (unit)	48 jenis	33.352.000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	DKP	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (unit)	38 jenis	28.260.000	
	7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	DKP	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	7 jenis	16.505.500		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	DKP	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	6 jenis	10.205.000	
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 jenis	6.105.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 jenis	3.050.000	
	9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	DKP	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 bulan	7.920.000		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	DKP	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	3.600.000	
	10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DKP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	39 OK	97.515.000		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DKP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	25 HOK	75.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	1	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DKP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke Dalam daerah (HOK)	199 OK	59.548.500		Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DKP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke Dalam daerah (HOK)	170 HOK	65.225.000	
	1	2	Penyediaan Makanan Dan Minuman	DKP	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 bulan	69.500.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	DKP	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	45 HOK	3.660.000	
2		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	DKP	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	199.540.000		Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	DKP	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)	100%	115.995.000	
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DKP	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	2 unit	59.840.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DKP	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	2 unit	23.200.000	
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DKP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 unit	82.500.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DKP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	80.795.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DKP	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	12 unit	57.200.000		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DKP	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	12.000.000	
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	DKP	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100 %	109.879.000		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	DKP	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100%	170.170.000	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP	Jumlah Dokumen SAKIP (buku)	18 jenis	73.551.500		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DKP	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-P/Profile Kinerja PD/ Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)	175 buku (14 jenis)	111.030.000	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DKP	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan Semester II (Buku)	100 buku	36.327.500		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DKP	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	100 buku (10 buku)	59.140.000	
6		Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenb	Persentase jumlah lumbung pangan yang aktif	88,24%	2.160.625.500		Program ketersediaan dan penanganan Rawan Pangan	Kabupaten Malang	Persentase penduduk rawan pangan	10,55%	423.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			ang										
	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	5 Kecamatan	465.854.400		Penanganan Daerah Rawan pangan		Jumlah Desa Rawan/rentan Pangan	10 buah	127.200.000	
	2	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah Desa untuk Replika Desa Mandiri Pangan	4 Desa	659.261.900		Pengembangan sumberdaya pangan lokal		Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	1 desa	217.200.000	
	3	Analisa Ketersediaan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah laporan untuk mengetahui kondisi Ketahanan Pangan Daerah	30 buku	80.940.200		Analisa Ketersediaan Pangan		Jumlah analisa Ketersediaan Pangan	30 buku (4 jenis)	78.600.000	
	4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah desa untuk Replika Desa Mandiri Pangan	4 Desa	954.569.000							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
4		Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Persentase Coefisien Variasi (CV) harga pangan di Tingkat Konsumen	<25%	919.233.040		Program Peningkatan distribusi dan cadangan pangan	Kabupaten Malang	Persentase Cadangan Pangan	0,034%	331.400.000	
	1	Pemantauan Harga Dan Pasokan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah dan informasi harga pangan	5 paket	335.211.580		Pemantauan Harga dan pasokan pangan		Jumlah laporan (database) harga pangan di 33 pasar Tradisional pada 33 Kecamatan	24 buku	103.150.000	
	2	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah dan informasi kondisi cadangan pangan	5 paket	277.702.700		Penanganan Cadangan Pangan Daerah		Jumlah Cadangan Pangan	8 ton	106.650.000	
	3	Penanganan Distribusi Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang ditangani	8 paket	306.318.760		Penanganan Distribusi pangan		Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	3 unit	121.600.000	
4		Program Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Persentase kenaikan skor pola pangan harapan	95,89%	2.781.461.100		Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Kabupaten Malang	Persentase capaian angka Kecukupan Gizi (AKG)	88,6%	824.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	1	Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah laporan PPH Kab. Malang	10 buku	635.140.000		Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi pangan		Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	2 buah	209.550.000	
	2	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah kelompok yang melaksanakan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	35 kelompok	598.114.000		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	2 kelompok	140.350.000	
	3	Promosi Pekarangan Konsumsi Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah sarana promosi penganekaragaman pangan jumlah lomba cipta menu, karangkitri, dan kegiatan Gerakan Makan Berbasis Pangan Lokal	32 kali	1.133.845.900		Promosi penganekaragaman konsumsi pangan		Jumlah kegiatan promosi penganekaragaman pangan	16 kali	398.850.000	
	4	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah kelompok pengembangan pangan pokok lokal	41 kali	414.361.000		Pengembangan pangan pokok lokal		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan kecamatan	20 kali	76.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
5		Program Keamanan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi	64%	1.332.007.600		Program keamanan pangan	Kabupaten Malang	Persentase keamanan pangan	64%	373.110.000	
	1	Kelembagaan Keamanan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah pembentukan, pemantauan dan pembinaan satgas keamanan pangan	19 kali	284.319.750		Kelembagaan keamanan pangan		Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang dibentuk	10 kelompok	94.420.000	
	2	Pengawasan Keamanan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah sampel pangan segar yang diuji Jumlah demplot dan penyuluhan keamanan pangan segar	33 paket	795.434.200		Pengawasan keamanan pangan		Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	20 buku	199.690.000	
	3	Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah kegiatan bimbingan teknis keamanan pangan dan pertemuan koordinasi keamanan pangan yang dilaksanakan	36 kali	252.253.650		Kerjasama dan informasi keamanan pangan		Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	12 kali	79.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
5		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Persentase laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	100%	144.648.900		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kabupaten Malang	Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	100%	119.060.000	
	1	Kajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Dan	Disesuaikan dengan hasil musrenbang	Jumlah laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	30 buku	144.648.900		Analisa kondisi ketahanan pangan		Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan	30 buku	119.060.000	
JUMLAH						8.338.884.640						2.968.530.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan, yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 tertuang dalam tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
DATA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALANG

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Agenda ketujuh pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas Nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
- (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga;

- (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019).

Sedangkan kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Timur pembangunan ketahanan pangan yang dikaitkan dengan visi, misi, serta program tertuang dalam misi kedua yaitu: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi yang dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Pangan serta Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada Tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini mengintruksikan pada semua unit pemerintah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah : Meningkatkan pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan adalah:

1. Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pangan masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melaksanakan 8 (Delapan) program dan 31 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
5. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
6. Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
7. Program Keamanan Pangan
8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
18. Analisa Kondisi Ketahanan Pangan
19. Penanganan Daerah Rawan Pangan
20. Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal
21. Analisa Ketersediaan Pangan
22. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
23. Penanganan Cadangan Pangan Daerah
24. Penanganan Distribusi Pangan
25. Analisis dan penyusunan Pola Konsumsi
26. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
27. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
28. Pengembangan Pangan Pokok Lokal
29. Kelembagaan Keamanan Pangan
30. Pengawasan Keamanan Pangan
31. Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan

Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan, Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Program Keamanan Pangan. Program tersebut merupakan program yang mengoordinasikan ketahanan pangan antar pelaku pembangunan baik unsur pemerintah, swasta, kelompok tani, kelompok tani wanita, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan tokoh masyarakat. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan									
2.03.2.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	DKP	100%	610.955.000			100%	724.904.950	
2.03.2.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	DKP	3000 buah	9.600.000	APBD		3000 buah	11.616.000	
2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	DKP	12 bulan	20.280.000	APBD		12 bulan	24.538.800	
2.03.2.03.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	DKP	300 OB	383.400.000	APBD		300 OB	452.370.600	
2.03.2.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	DKP	24 OB	4.800.000	APBD		24 OB	5.808.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.2.03.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	DKP	20 unit	3.750.000	APBD		20 unit	4.537.500	
2.03.2.03.01.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	DKP	38 jenis	28.260.000	APBD		38 jenis	31.387.400	
2.03.2.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	DKP	6 jenis	10.205.000	APBD		6 jenis	12.348.050	
2.03.2.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	DKP	5 jenis	3.050.000	APBD		5 jenis	3.690.500	
2.03.2.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	DKP	2 jenis	3.600.000	APBD		2 jenis	4.356.000	
2.03.2.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	DKP	45 HOK	3.660.000	APBD		45 HOK	4.428.600	
2.03.2.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	DKP	2s5 OK	75.125.000	APBD		25 HOK	90.901.250	
2.03.2.03.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	DKP	199 OK	65.225.000	APBD		170 HOK	78.922.250	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	DKP	100%	115.995.000			100%	166.731.950	
2.03.2.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	DKP	12 unit	12.000.000			2 jenis (3 unit)	14.520.000	
2.03.2.03.01.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DKP	1 jenis (4 unit)	112.854.500			1 jenis (4 unit)	124.139.950	
2.03.2.03.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	DKP	2 unit	23.200.000			2 unit	28.072.000	
2.03.2.03.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	DKP	100%	170.170.000			100%	122.197.900	
2.03.2.03.01.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	DKP	18 jenis	73.551.500	APBD		175 buku (14 jenis)	87.301.500	
2.03.2.03.1.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	DKP	100 buku	36.327.500	APBD		100 buku (10 jenis)	34.896.400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.2.03.01.10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	Kab Malang	100%	119.060.000			100%	105.996.000	
2.03.2.03.01.10.01	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan	Kab Malang	30 buku	119.060.000	APBD		30 buku	105.996.000	
2.03.2.03.01.06	Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase penduduk rawan pangan		10,55%	423.000.000			10,30%	511.830.000	
2.03.2.03.01.06.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	Kab Malang	1 buah	127.200.000	APBD		1 buah	153.912.000	
2.03.2.03.01.06.02	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Kab Malang	1 desa	217.200.000	APBD		1 Desa	262.812.000	
2.03.2.03.01.06.03	Analisa Ketersediaan Pangan	Jumlah analisis Ketersediaan Pangan	Kab Malang	30 buku	78.600.000	APBD		30 buku	95.106.000	
2.03.2.03.01.07	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Persentase cadangan pangan	Kab Malang	0.034%	331.400.000			0.034%	400.994.000	
2.03.2.03.01.07.01	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah laporan (database) harga pangan di 33 pasar Tradisional pada 33 Kecamatan	Kab Malang	24 buku	103.150.000	APBD		24 buku	124.811.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.2.03.01.07.02	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Kab Malang	8 ton	106.650.000	APBD		8 ton	129.046.500	
2.03.2.03.01.07.03	Penanganan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	Kab Malang	3 unit	121.600.000	APBD		3 unit	147.136.000	
2.03.2.03.01.08	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Kab Malang	88,60%	824.850.000			88.70%	1.022.268.500	
2.03.2.03.01.08.01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Ponsumsi Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	Kab Malang	2 buku	209.550.000	APBD		2 buah	253.555.500	
2.03.2.03.01.08.02	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	Kab Malang	2 kelompok	140.350.000	APBD		26 kelompok	169.823.500	
2.03.2.03.01.08.03	Promosi Pekarangan Konsumsi Pangan	Jumlah sarana promosi penganekaragaman pangan	DKP	16 kali	398.850.000	APBD		16 kali	506.808.500	
2.03.2.03.01.08.04	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan kecamatan	Kab Malang	20 kali	76.100.000	APBD		20 kali	92.081.000	
2.03.2.03.01.09	Program Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	Kab Malang	64%	373.110,000			66%	496.829.700	
2.03.2.03.01.09.01	Kelembagaan Keamanan Pangan	Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang dibentuk	Kab Malang	19 kali	94.420.000	APBD		10 kelompok	145.748.200	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.2.03.01.09.02	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	Kab Malang	33 paket	199.690.000	APBD		20 buku	255.491.500	Gender
2.03.2.03.01.09.03	Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	Kab Malang	36 kali	79.000.000	APBD		12 kali	95.590.000	
JUMLAH					2.968.540.000		JUMLAH	3.551.753.000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Program Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	Ketersediaan dan penanganan Rawan Pangan	Persentase penduduk rawan pangan	10,55%	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah desa rawan/rentan pangan	11 Desa	139.920.000	Kabupaten Malang
				Pengembangan sumberdaya pangan lokal	Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	1 Desa	238.920.000	Kabupaten Malang
				Analisa ketersediaan pangan	Jumlah analisa Ketersediaan Pangan	30 buku (4 jenis)	86.460.000	Kabupaten Malang
2	Peningkatan Distribusi dan cadangan pangan	Persentase cadangan pangan	0,034%	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah laporan (database) harga pangan di 33 pasar Tradisional pada 33 Kecamatan	24 buku	113.465.000	Kabupaten Malang
				Penanganan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan	8 ton	117.315.000	Kabupaten Malang
				Penanganan distribusi pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	3 unit	133.760.000	Kabupaten Malang
3	Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	88,6%	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan (PPH) dan Peta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	2 buah	230.505.000	Kabupaten Malang
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	2 kelompok	154.385.000	Kabupaten Malang

				Promosi Penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah kegiatan promosi penganekaragaman pangan	16 kali	460.735.000	Kabupaten Malang
				Pengembangan pangan pokok lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan kecamatan	20 kali	83.710.000	Kabupaten Malang
4.	Keamanan pangan	Persentase keamanan pangan	64%	Kelembagaan keamanan pangan	Jumlah Satgas Keamanan Pangan	10 kelompok	118.862.000	Kabupaten Malang
				Pengawasan keamanan pangan	Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	20 buku	232.265.000	Kabupaten Malang
				Kerja sama dan informasi keamanan pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	12 kali	86.900.000	Kabupaten Malang

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Rencana Kerja Tahun 2019 ini terdapat 8 Program dan 31 Kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2019 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI